

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN WEST NUSA TENGGARA

Hari Prasetyo Sutanto

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri

hari.sutanto@my.jcu.edu.au

Abstract: This research investigates the implementation of Education for Sustainable Development (ESD) in the local governments, educational institutions and communities in West Nusa Tenggara. This exploratory research uses descriptive analysis. It concludes that the understanding of ESD at the provincial level to the community level varies due to the lack of seriousness of the central government. Only a few programs, activities and school subjects which are related to aspects of ESD are implemented in schools and communities in West Nusa Tenggara. However, some schools and boarding houses successfully integrate aspects of ESD into school subjects such as Biology, Geography, Art and Religion and extracurricular activities such as Scouts, Youth Red Cross and the council. At the community level, aspects of ESD in West Nusa Tenggara are much more implemented by youth organizations and local NGOs. However, they are still run independently on sectorial basis and with minimum network.

Keywords: Education, ESD, West Nusa Tenggara

PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji kondisi pelaksanaan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PPB) di tingkat pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penelitian ini bersifat eksploratif dengan menggunakan analisis deskriptif. Kajian ini mendapatkan kesimpulan bahwa pemahaman terhadap PPB di tingkat provinsi hingga tingkat masyarakat berbeda-beda dikarenakan minimnya keseriusan di tingkat pemerintah pusat. Hanya sedikit program, kegiatan dan mata pelajaran sekolah yang terkait aspek-aspek PPB dilaksanakan di sekolah dan di masyarakat di NTB. Beberapa sekolah dan pesantren berhasil mengintegrasikan aspek-aspek PPB ke dalam kegiatan mata pelajaran seperti biologi, geografi, seni, dan agama, serta kegiatan ekstrakurikuler berupa Pramuka, Palang Merah Remaja dan Organisasi Siswa Intra Sekolah. Di tingkat masyarakat, aspek-aspek PPB di NTB lebih banyak dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan dan LSM lokal meskipun masih berjalan dengan arah masing-masing secara independen, sektoral dan minim jaringan.

Kata Kunci: *kondisi pendidikan, Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan, Nusa Tenggara Barat*

PENDAHULUAN

Pembangunan tidak hanya berdampak positif mengurangi kesenjangan, namun juga berdampak negatif berupa eksploitasi sumber daya alam dan degradasi lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai jawaban untuk mengatasi dampak negatif pembangunan. Konsep ini sudah ada sejak tahun 80-an sebagai respon terhadap tantangan ekonomi dan sosial, dengan memberikan perhatian terhadap lingkungan dan konservasi sumber daya alam (UNESCO, 2011).

Pendidikan dapat mempercepat pembangunan berkelanjutan, karena melalui cara ini persepsi, perilaku dan sikap akan berubah. Konsep Education for Sustainable Development (ESD) atau Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PPB) muncul sebagai jawaban untuk mencapai pembangunan yang dicita-citakan. Konsep ini melibatkan semua pihak secara global untuk memberikan kontribusi dan perubahan ke arah yang lebih baik. Secara khusus, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan bahwa PPB harus dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), masyarakat, sektor swasta, lembaga pendidikan formal, masyarakat sipil, media, dan organisasi internasional (DESD, 2012).

Pelaksanaan PPB di Indonesia sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada Kabinet Indonesia Bersatu (2008-2009), namun pelaksanaannya tidak dilakukan secara menyeluruh dan serius. Hasil studi pada tahun 2008 menemukan bahwa penerapan PPB memiliki masalah pada

regulasi, sumber daya manusia, dan materi PPB itu sendiri (Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2010). Lebih spesifik, penelitian ini menilai penerapan PPB dari tingkat pusat ke tingkat daerah belum dilengkapi dengan peraturan, kebijakan dan program yang jelas, serta para pejabat di lingkungan pendidikan kurang memahami PPB karena minimnya sosialisasi. Selain itu, para guru kurang mengerti bagaimana mengintegrasikan teori dan praktek PPB di sekolah disamping kurangnya materi pembelajaran PPB.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang masih memiliki permasalahan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti kemiskinan, kepadatan penduduk, perubahan iklim, termasuk pendidikan. Dalam hal pendidikan, daerah ini masih mengalami masalah dalam memahami materi pendidikan, kualitas pendidikan, dan guru yang berkualitas (*Kompas*, 2010). Situasi ini menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan wajib dan tingginya angka buta huruf. Badan Pusat Statistik NTB (2013) menunjukkan bahwa Provinsi NTB masih memiliki 16,32% penduduk yang buta huruf dan hanya memenuhi 7,19% tahun dari wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Dengan berbagai masalah yang dialami di NTB, tantangan untuk mencapai PPB akan lebih sulit. Pencapaian PPB bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan formal. Keberhasilan PPB juga perlu keterlibatan elemen masyarakat seperti tokoh, lembaga, dan lingkungan

keluarga untuk keberhasilannya. Untuk itu, diperlukan studi yang melihat kondisi pendidikan untuk PPB di tingkat masyarakat, lembaga pendidikan formal dan pemerintah daerah di Provinsi NTB.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kondisi pelaksanaan PPB di pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan tingkat masyarakat yang ada di NTB. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji pemahaman pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tingkat masyarakat terhadap PPB di Nusa Tenggara Barat; 2) mengkaji program, kurikulum dan kegiatan yang berkaitan dengan PPB di pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tingkat masyarakat di Nusa Tenggara Barat; dan 3) mengkaji persepsi siswa SMA dan sederajat yang terkait dengan sistem pendidikan dan aspek PPB di Nusa Tenggara Barat.

Secara resmi, konsep Pembangunan Berkelanjutan muncul pertama kali di pertemuan *Brutland Commission* dengan definisi 'pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka' (*United Nations*, 2010). Konsep ini berkembang seiring waktu dan isu-isu yang berkembang di dunia dan dipahami secara berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing negara.

PPB bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan dan

pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu pendidikan, dan menuntut manusia untuk bertanggungjawab terhadap masa depan yang berkelanjutan (*United Nations Environment Programme*, 2014). Konsep ini menuntut semua pihak untuk mengubah cara penyampaian pendidikan dan memastikan kita membuat keputusan yang tepat di masa depan. Konsep ini juga melibatkan semua pihak secara global untuk memberikan kontribusi dan perubahan untuk arah yang lebih baik.

PBB secara resmi muncul dari KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg pada tahun 2002. Majelis Umum PBB memutuskan pada 2005-2014 adalah Dekade untuk Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PPB) dan juga mengatur UNESCO sebagai pusat koordinasi untuk pencapaiannya. Untuk melakukan tugasnya, UNESCO berfokus pada tiga hal penting, yaitu perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pengurangan risiko bencana (*Sustainable Development*, 2014). Untuk mengembangkan PPB melalui strategi regional, UNESCO Bangkok melakukan analisis situasional isu di kawasan Asia Pasifik. Lembaga ini menilai untuk mencapai Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik perlu diprioritaskan pada informasi, pengetahuan, keadilan, perlindungan lingkungan, budaya, konteks lokal, pendidikan lingkungan, kesehatan dan keterlibatan para pemimpin (Tabel 1).

Tabel 1 Analisis situasional isu di kawasan Asia Pasifik

Isu-isu	Contoh
Informasi dan kesadaran <i>(Information and awareness)</i>	Eco-media, literasi media, ICT
Sistem pengetahuan <i>(Knowledge systems)</i>	Belajar untuk pengetahuan lokal dan adat, mengintegrasikan teknologi tradisional dan modern
Pengelolaan dan perlindungan lingkungan <i>(Environmental protection and management)</i>	Keanekaragaman hayati, perubahan iklim, sumberdaya alam, konservasi
Perdamaian dan ekuitas <i>(Peace and equity)</i>	Resolusi konflik, perdamaian, kesetaraan, pembangunan yang tepat, dan demokrasi
Konteks lokal <i>(Local context)</i>	Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat
Perubahan <i>(Transformation)</i>	Transformasi perdesaan, urbanisasi, habitat yang berkelanjutan air, sanitasi, infrastruktur publik
Budaya <i>(Culture)</i>	Pemahaman keanekaragaman antar budaya dan antar agama
Isu lintas sektor <i>(Cross cutting issues and themes)</i>	Hak asasi manusia, kewarganegaraan, kesetaraan gender, masa depan yang berkesinambungan, pendekatan holistik, inovasi, kemitraan, konsumsi dan produksi yang berkesinambungan, dan tata kelola pemerintahan
Kesehatan <i>(Health)</i>	HIV/AIDS, malaria
Pendidikan Lingkungan <i>(Environmental education)</i>	Manajemen hama terpadu, kesadaran lingkungan, program daur ulang masyarakat,
Keterlibatan Pemimpin <i>(Engagement of leaders)</i>	Kursus pelatihan professional, pendidikan eksekutif, kemitraan dan jaringan

Sumber: UNESCO Bangkok, 2005

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi PPB ke dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tahun 2010-2014. Rencana tersebut mencakup PPB sebagai bagian dari paradigma pendidikan dan budaya, namun pemahaman pemerintah mengenai PPB tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh UNESCO dan

IUCN. Pemerintah membatasi PPB pada aspek budaya, tanggung jawab sosial dan alam lingkungan. Pelaksanaan PPB juga dianggap tidak eksplisit dan optimal karena kurangnya peraturan teknis, minim sosialisasi, dan dukungan materi yang terbatas (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011). Hal ini

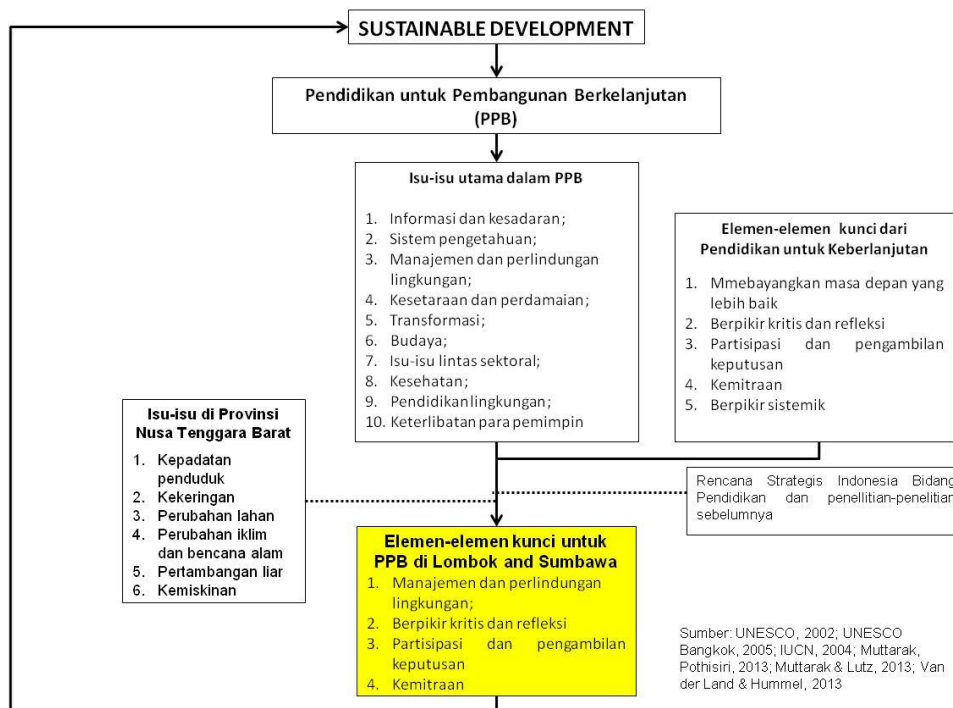
mengakibatkan pemerintah daerah kesulitan untuk memahami dan menerapkan PPB. Pendidikan di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam hal akses, kualitas dan hasil pendidikan, dan manajemen. Mutohir (2013) mengemukakan bahwa pendidikan di NTB masih mengalami masalah buta huruf, angka putus sekolah, kurangnya kualitas pendidikan infrastruktur, kualitas guru dan siswa sekolah menengah atas di daerah terpencil dan terisolasi.

Selain pendidikan, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki beberapa masalah yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Butler et al. (2013) menunjukkan bahwa iklim di Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh *El Nino* yang dapat menghasilkan kekeringan dan musim hujan lebih panjang dari rata-rata tahunannya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2014), Provinsi ini memiliki kepadatan penduduk tertinggi ke-2 di bagian timur Indonesia dengan 228 penduduk per-kilometer persegi. Berbeda dengan Australia yang hanya memiliki 3 (tiga) penduduk per-kilometer persegi. Masih terdapat sekitar 820.000 penduduk NTB (17,2%) yang masih hidup di bawah garis kemiskinan yang menunjukkan angka ini lebih tinggi dari persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Indonesia, yaitu 11,2% (Badan Pusat Statistik, 2014). Provinsi ini juga mengalami konflik pengelolaan

sumber daya alam yang telah terjadi bertahun-tahun, baik secara vertikal (antara masyarakat dan pemerintah) maupun horisontal (antara masyarakat dan antara pemerintah).

Pendidikan formal sangat terkait dengan isu-isu lingkungan. Isu-isu yang ada di Nusa Tenggara Barat memberikan tantangan dan hambatan terhadap pencapaian PPB. Beberapa penelitian telah melihat pendidikan formal berhubungan positif antara lain dengan kesiapsiagaan bencana, pengurangan kerentanan, dan peningkatan kapasitas adaptasi di tengah perubahan iklim (Muttarak & Pothisiri, 2013; Muttarak & Lutz, 2013; Van der Land & Hummel, 2013). Beberapa konsep dari UNESCO dan IUCN juga telah melihat peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan melalui kemitraan, berpikir kritis dan partisipasi yang penting dalam mengurangi masalah yang terjadi di lingkungan.

Dapat disimpulkan bahwa ada empat aspek penting yang perlu dilihat dalam PBB di NTB. Aspek-aspek tersebut adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berpikir kritis dan refleksi (perenungan), partisipasi dan pengambilan keputusan, serta kemitraan (Gambar 1). Keempat aspek akan dilihat pada tingkat masyarakat, lembaga pendidikan dan pemerintah daerah.



Gambar 1. Aspek-aspek Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat

Sumber: UNESCO, 2011; UNESCO Bangkok, 2005; Tilbury & Wortman, R., & Pothisiri, W., 2013; Muttarak, R., & Lutz, W., 2013; Van der Land, 2013.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Pulau Lombok dan Sumbawa, NTB. Dua desa dipilih sebagai sampel untuk melihat aspek-aspek pendidikan di tingkat masyarakat, yaitu Desa Rempek (Kabupaten Lombok Utara), dan Desa Calabai (Kabupaten Dompu). Sekolah menengah tingkat atas (SMA dan sederajat) dipilih untuk mengukur persepsi siswa sekolah dari aspek Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PPB). Dari sekolah menengah atas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, secara purposive dipilih 4 (empat) sekolah, yaitu: SMA Al Ma'arif (Kabupaten Lombok Utara), SMA 1 Tanjung (Kabupaten Lombok Utara), SMA 7 Mataram (Kota

Mataram), dan SMA 1 Pekat (Kabupaten Dompu).

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk melihat pelaksanaan PPB di Nusa Tenggara Barat. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi data statistik, laporan penelitian, atau proyek terkait. Observasi yang dilakukan adalah pengamatan yang bersifat 'overt' atau terbuka, dimana objek penelitian akan menyadari mereka sedang amati (Center for Disease Control and Prevention, 2008). Pengamatan semacam ini dilakukan

sebagai cara untuk menentukan perilaku etis, kejadian, atau mengetahui karakteristik fisik keadaan alami mereka. Wawancara akan dilakukan kepada pejabat pemerintah daerah, perwakilan lembaga pendidikan, dan unsur-unsur masyarakat. Wawancara juga akan dilakukan pada guru atau kepala sekolah, aktivis Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) lokal, orang tua, dan tokoh adat di desa setempat. Untuk mengetahui sensitivitas siswa terhadap PPB, digunakan instrument kuesioner sederhana kepada siswa SMA dan sederajat yang ada di Provinsi NTB.

Kuisisioner diukur dengan skala likert yang dikembangkan dari jawaban hasil wawancara dengan pejabat pemerintah, sekolah dan unsur masyarakat. Kuesioner tersebut memuat pernyataan-pernyataan dan pertanyaan terhadap aspek-aspek PPB di lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa. Kuesioner diberikan kepada 50 siswa kelas secara acak di masing-masing sekolah sehingga didapatkan 200 hasil kuesioner. Dari 200 kuesioner yang didapatkan, terdapat 195 kuesioner yang memenuhi syarat untuk dilakukan analisis data. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan tabulasi silang (*crosstab*) dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner, sedangkan analisis isi digunakan untuk menjelaskan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi. Analisis data deskriptif akan melakukan dengan memeriksa, mengedit, pelabelan, dan koding. Analisis isi dilakukan melalui tahapan pengumpulan data-data jawaban,

reduksi data, pengelompokan isu, penafsiran data, dan penarikan kesimpulan. Kedua analisis ini diharapkan dapat saling mendukung untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Tambahkankan kapan penelitian ini dilaksna dan di mana?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemahaman Konsep PPB di tingkat pemerintah daerah dan masyarakat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup familiar dengan konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PPB), tetapi belum memiliki keseriusan dalam penerapannya. Secara khusus, Pemerintah Nusa Tenggara Barat belum memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan PPB. Kebijakan yang terkait dengan PPB bersifat umum dan diintegrasikan dengan kebijakan lainnya dalam bentuk manajemen, perlindungan, dan pendidikan lingkungan.

Demikian juga di tingkat pemerintah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat, dimana konsep PPB belum banyak dimengerti. Beberapa pejabat pemerintah masih menyamakan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan Pendidikan Lingkungan. Sehingga, kebijakan yang diterapkan di tingkat kabupaten/kota masih berfokus pada pengelolaan lingkungan, tidak secara khusus berfokus pada aspek partisipasi, pemikiran kritis dan kemitraan. Pemerintah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat juga masih terfokus pada pencapaian target fisik dan prestasi angka-angka seperti

pencapaian pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Guru dan pejabat di sekolah cukup akrab dengan konsep dan aspek-aspek yang ada di PPB. Mereka mengaku mendapatkan sosialisasi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun, sosialisasi yang diberikan masih bersifat formalitas tanpa dilengkapi dengan petunjuk teknis yang jelas mengenai pelaksanaan PPB di sekolah. Hal ini mengakibatkan guru dan pejabat memiliki persepsi masing-masing terhadap pelaksanaan PPB. Selain masalah teknis pelaksanaan, guru dan pihak sekolah juga memiliki masalah dengan beban kerja yang tinggi dalam mengajar. Banyak guru-guru sekolah mengajar lebih dari satu mata pelajaran dan beberapa guru juga memiliki tugas ganda sebagai pejabat sekolah. Keadaan ini juga menyebabkan sulitnya guru dan pejabat sekolah menyiapkan bahan ajar. Beban baru yang dialami guru dan pejabat di lingkungan pendidikan akan menyebabkan keengganan untuk menerapkan PPB (Hamidi, et al, 2014).

Tokoh masyarakat yang ada di desa kurang memahami istilah Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan, karena mereka lebih familiar dengan istilah pendidikan lingkungan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, diantara beberapa tokoh masyarakat yang ada, tokoh agamalah yang menunjukkan perhatian terhadap pendidikan non-formal yang terkait dengan PPB di Nusa Tenggara Barat. Tokoh agama dinilai memiliki peranan yang menentukan keberhasilan lingkungan sosial budaya di

masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan Utsman (2012) tentang peran tokoh masyarakat dalam menciptakan kampung pendidikan menyimpulkan bahwa tokoh agama sangat berperan dalam menciptakan kampung pendidikan dengan strategi pendekatan budaya dan pendekatan toleransi. Pendekatan budaya dan toleransi ini sangat terkait dengan aspek-aspek PPB seperti pemeliharaan terhadap lingkungan, kerjasama dengan sesama, berpikir dan berpartisipasi secara bersama-sama dalam menjaga lingkungan.

Berbeda dengan tokoh masyarakat, beberapa organisasi pemuda dan LSM yang ada di tingkat lokal cukup familiar dengan konsep PPB, terutama mereka yang fokus pada pendidikan dan lingkungan. Meskipun konsep ini tidak sepenuhnya dipahami, mereka memiliki kegiatan yang mengenai target-target yang mengenai aspek partisipasi, pemikiran kritis dan kemitraan. Di Lombok Utara, ada 'Klub Baca Perempuan' yang dipelopori oleh Nursida Syam, aktivis perempuan yang berhasil menyebarkan minat baca pada semua umur. Di Desa Calabai, ada beberapa organisasi pemuda lingkungan yang menyebarkan perhatiannya terhadap isu lingkungan dan pendidikan seperti GAMPPING (Generasi Muda Penjelajah Hutan dan Pendaki Gunung), HAMNI (Organisasi Keagamaan Pemuda) dan KOMPPAK (Komunitas Pecinta Penyus dan Karang).

Program dan kegiatan terkait PPB di pemerintah daerah dan masyarakat

Pemerintah pusat memiliki program yang disebut 'Sekolah Adiwiyata' sebagai salah satu kebijakan untuk mencapai Pendidikan untuk

Pembangunan Berkelanjutan. Program ini dimulai pada tahun 2006 oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sekolah yang berbudaya dan memperhatikan lingkungan, terutama sekolah menengah atas. Program ini mengajak manajemen sekolah untuk memberikan pengajaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pendidikan, partisipatif dan berkelanjutan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Kegiatan perlindungan lingkungan di sekolah dapat diterapkan melalui pengelolaan sampah, pembuatan pupuk organik, penyediaan tanaman obat, pengelolaan drainase, hingga kantin kejujuran di sekolah. Sementara dalam konteks kurikulum, pengembangan lingkungan berbasis substansi dan pengetahuan lokal perlu diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sains (Lomboktoday, 2013).

Pada kenyataannya, tidak semua sekolah menengah atas di Nusa Tenggara Barat berpartisipasi dalam program ini. Hanya sekolah-sekolah tertentu dengan infrastruktur dan manajemen yang berwawasan lingkungan terpilih untuk mewakili kompetisi tingkat nasional. Umumnya sekolah-sekolah ini adalah SMA atau sekolah sederajat yang memiliki predikat unggul dan berada di wilayah perkotaan. Beberapa sekolah berhasil mengubah perilaku siswa dan guru menjadi lebih sadar lingkungan. Mereka menyadari bahwa lingkungan yang dikelola dengan baik akan menciptakan tempat yang nyaman. Namun, di sisi lain banyak sekolah yang menghentikan program sekolah

Adiwiyata karena mereka tidak lagi diikuti dalam kompetisi dan gagal memberikan manfaat langsung pada siswa dan guru. Tujuan pemerintah untuk mewujudkan sekolah berbudaya dan sadar lingkungan nyatanya kurang memberikan hasil di Nusa Tenggara Barat. Program ini diadopsi semata-mata untuk mencapai keberhasilan tingkat persaingan antar sekolah dan nama baik sekolah, bukan untuk menciptakan kesadaran dan bertindak untuk lingkungan.

Terlepas dari program Sekolah Adiwiyata, beberapa sekolah yang tidak mengikuti program ini berusaha mengintegrasikan aspek Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PPB) ke dalam kegiatan pengajaran. Para guru SMA dan Madrasah Aliyah mengintegrasikan aspek PPB ke dalam pelajaran Biologi, Geografi dan Seni. Pada waktu-waktu tertentu guru Geografi dan Biologi melakukan aktivitas ke lapangan untuk memahami lingkungan dan peristiwa alam. Guru seni mengajarkan siswanya untuk membuat barang-barang daur ulang yang memiliki nilai ekonomi sebagai bahan penilaian. Selain pengajaran yang terkait kurikulum, sekolah juga menggunakan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) atau Palang Merah Remaja (PMR) untuk mendukung pencapaian PPB. Pramuka mengajarkan kegiatan pengelolaan lingkungan, dan berpikir kritis terhadap lingkungan sekitar, kegiatan OSIS membentuk siswa untuk lebih partisipatif, membangun kemitraan dan mampu mengambil keputusan, sedangkan PMR membentuk siswa untuk lebih peduli dengan sesama melalui aktivitas di bidang kesehatan

dan pengenalan obat-obatan yang dapat dimanfaatkan dari alam.

Berbeda dengan sekolah-sekolah pemerintah, pesantren sudah melakukan lebih banyak kegiatan yang terintegrasi dengan alam. Beberapa pesantren di Nusa Tenggara Barat telah menerapkan pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari pendidikan berbasis agama. Salah satu contohnya adalah pesantren Nurul Haramain yang berada di Narmada, Lombok Barat. Pesantren ini berhasil mengaplikasikan pendidikan agama yang memperhatikan aspek kesetaraan gender, kerukunan beragama, pengelolaan lingkungan dan keterlibatan masyarakat (Lomboknews, 2011). Pesantren ini mendapat penghargaan dari Ramon Magsaysay Foundation Filipina karena berhasil mengembangkan konservasi alam dengan program reboisasi Lembah Madani seluas 36 hektar. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dengan menyediakan bibit gratis yang dikembangkan oleh murid-murid pesantren.

Elemen masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, dan pejabat lokal di Nusa Tenggara Barat memiliki kearifan lokal berupa pengetahuan, kebijakan dan budaya lokal yang dapat diberikan kepada anak usia sekolah sebagai pendidikan non formal. Kearifan lokal ini lebih dikenal luas dengan sebutan *local wisdom* yang terbentuk lama dari nenek moyang mereka. Kearifan lokal ini terbentuk secara alami melalui pengalaman yang didapat dari lingkungan alam maupun sosial. Menurut Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (2015), pengetahuan dan praktik tradisional yang diterapkan oleh masyarakat adat

atau komunitas lokal juga menjadi kunci mencegah kerusakan keanekaragaman hayati dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Bentuk pengetahuan dan praktik kearifan lokal yang dapat dikenali di lapangan adalah kegiatan *gotong royong*, *hukum adat tertulis dan lisan*, dan *norma-norma sopan santun*. Lebih lanjut, menurut PPLH (2015) jika kegiatan kearifan lokal didukung dan hak-hak mereka diakui, maka peran mereka akan semakin besar.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, kegiatan-kegiatan tersebut diatas kurang diterapkan kepada anak usia sekolah di NTB. Orang tua dan tokoh masyarakat kurang sensitif dalam melibatkan anak usia sekolah dalam kegiatan gotong royong, pertemuan adat, atau kegiatan lainnya yang didominasi oleh masyarakat dewasa. Orang tua dan tokoh masyarakat masih mempercayakan pendidikan sebagai tanggungjawab pendidikan formal di sekolah. Padahal, pendidikan dalam bentuk pengetahuan dan kearifan lokal membawa manfaat yang signifikan karena pada dasarnya masyarakat mempunyai pemahaman yang cukup memadai, namun akan lebih meyakinkan apabila pengetahuan mereka terhubung dengan keyakinan agama (McKay et. al, 2013). Selain itu, anak usia sekolah kurang memiliki kemauan untuk mengenal, mempelajari, mengamati dan menerapkan pengetahuan lokal di lingkungan mereka. Generasi muda di Nusa Tenggara Barat saat ini lebih tertarik dengan perkembangan teknologi informasi seperti internet dan media sosial daripada melakukan kegiatan sosial masyarakat. Menurut Sita (2013) kemajuan teknologi dan

gaya hidup dari dunia barat telah menyebabkan remaja berperilaku ikut-ikutan tanpa selektif sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut dan adat kebiasaan yang mereka miliki.

Organisasi masyarakat seperti LSM dan organisasi pemuda juga memiliki aktivitas yang terkait dengan aspek-aspek PPB. Namun, aktivitas mereka masih bersifat umum dan tidak terfokus pada sasaran anak usia sekolah. Program pendidikan dan pembinaan dari LSM juga menyesuaikan dengan isu-isu lokal di wilayah kerjanya masing-masing. Di Pulau Lombok terdapat beberapa LSM yang memiliki aktivitas terkait aspek-aspek PPB, yaitu Kelompok Studi Lingkungan dan Pariwisata (KOSLATA), Gerakan Masyarakat Cinta Alam (Gema Alam), Kelompok Baca Perempuan dan Juang Laut Lestari (JARI). Di Pulau Sumbawa juga terdapat beberapa organisasi yang bersifat lokal di lingkup desa seperti Komunitas Pecinta Penyu dan Karang (KOMPPAK) dan Generasi Muda Penjelajah Rimba dan Pendaki Gunung (GAMPING).

Kegiatan-kegiatan LSM yang ada di Nusa Tenggara Barat lebih sesuai dengan capaian PPB dibanding program atau kegiatan yang dimiliki pemerintah, institusi pendidikan maupun elemen masyarakat. Yayasan KOSLATA menggunakan pola sosialisasi dan pendidikan ke masyarakat, guru dan anak sekolah dasar dalam salah satu program kegiatannya. Pola ini disertai dengan penyediaan bahan materi buku-buku bergambar, teknik simulasi dan lagu. Yayasan Gema Alam menasar pada kesetaraan gender. Gema Alam mengangkat derajat wanita dalam

kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengubah pola pikir perempuan dalam beberapa kegiatan pengelolaan alam. Beberapa diantaranya adalah program manajemen komunitas pengelola hutan perempuan, program sekolah untuk perempuan, dan kampanye kesetaraan gender melalui konsep 'manusia baru'. Program ini memang menasar pada kelompok perempuan, namun ke depannya akan dikembangkan pada perempuan di usia sekolah.

Kelompok Baca Perempuan di Lombok Utara yang dipimpin Nursida Syam berhasil mengembangkan kegiatannya dari kampanye gemar membaca hingga mendirikan Sekolah Alam. Sekolah non formal ini mengembangkan konsep belajar dengan prinsip partisipasi, berpikir kritis, bebas berkreasi, menyenangkan, juga mengedepankan pengembangan sikap dan disiplin. Sekolah Alam ini mengembangkan kelas-kelas kreatif seperti kelas aspirasi, kelas perempuan, kelas bioskop, kelas tanam, kelas menggambar, hingga kelas fotografi. Sebagian kelas-kelas tersebut merupakan gagasan dari siswa-siswanya sendiri. Yayasan Juang Laut Lestari (JARI) memiliki fokus pada konservasi kelautan dan pesisir. Yayasan ini memiliki program pendidikan kelautan menggunakan *Education Boat* (perahu pendidikan) yang berfungsi sebagai media belajar tentang konservasi laut untuk masyarakat pesisir. Perahu ini akan mengunjungi desa-desa pesisir untuk mengkampanyekan lingkungan laut dengan target anak-anak usia sekolah.

Aktivitas organisasi masyarakat di Pulau Sumbawa bersifat lebih lokal dan belum memiliki jaringan luas. Dari

beberapa organisasi yang memperhatikan lingkungan dan pendidikan, terdapat dua organisasi yang aktif bergerak dan bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Organisasi tersebut adalah KOMPPAK (Komunitas Pecinta Penyu dan Karang) yang berfokus pada konservasi kehidupan di laut dan GAMPING (Generasi Muda Penjelajah Rimba dan Pendaki Gunung) yang memberikan perhatian pada kelestarian kehidupan di sekitar gunung Tambora.

KOMPPAK adalah satu-satunya LSM yang terdaftar di Desa Calabai, Kabupaten Dompu yang telah berdiri sejak tahun 2008. Organisasi ini mendorong kaum muda untuk meningkatkan kesadaran tentang pelestarian terumbu karang dan penyu di wilayah pesisir Calabai. Beberapa kegiatannya antara lain mengajak anak usia sekolah untuk menanam pohon bakau di pesisir pantai, melakukan transplantasi/pembibitan karang, dan menjaga area bertelur penyu hijau. Di awal tahun 2014 mereka berhasil mencegah aktivitas penambangan pasir besi di pesisir Desa Calabai karena dikhawatirkan merusak terumbu karang dan tempat bertelur penyu.

Organisasi GAMPING berfokus pada advokasi lingkungan, dan membangun kesadaran remaja untuk peduli terhadap lingkungan. Organisasi yang telah berdiri selama 15 tahun ini dibangun di atas keprihatinan pemuda atas kegiatan pembalakan liar, kurangnya pengembangan pariwisata dan kurangnya lapangan kerja. Kegiatan organisasi yang membuka memanjat jalur alternatif, pemantauan hutan, pemetaan lokasi mata air, dan panduan untuk para wisatawan. Kegiatan ini

cukup menguntungkan bagi para pemuda, seperti di samping meningkatkan sensitivitas dan berpikir kritis pada alam, dapat meningkatkan perekonomian dengan menyediakan pekerjaan di sektor pariwisata.

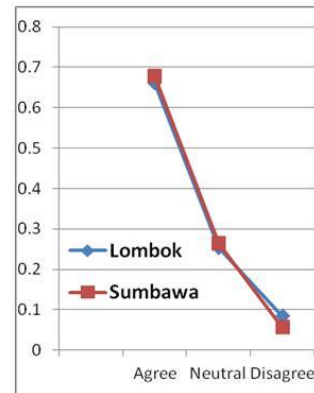
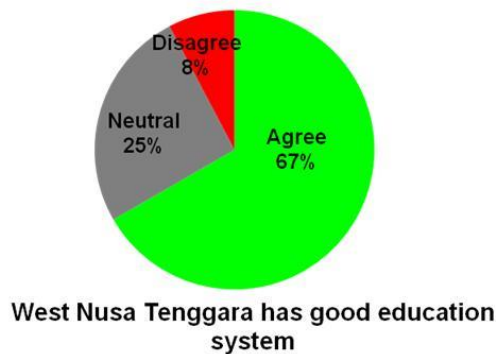
Persepsi siswa terhadap aspek-aspek terkait PPB

Dari kuesioner penelitian yang didistribusikan terdapat 195 responden dari tiga SMA milik pemerintah dan satu sekolah swasta di Pulau Lombok dan Sumbawa. Hasil analisis menunjukkan sebanyak 67 persen siswa tingkat SMA setuju bahwa pendidikan di Nusa Tenggara Barat masih memiliki sistem yang baik. Sebanyak 25 persen responden, atau satu dari empat siswa bersifat netral terhadap kualitas sistem pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Hanya delapan persen responden yang beranggapan sistem pendidikan di provinsi ini berkualitas buruk. Tidak ada perbedaan ketika sistem pendidikan dilihat dari persepsi siswa diantara Pulau Lombok dan Sumbawa.

Responden juga dimintakan persepsinya atas pernyataan-pernyataan yang terkait aspek-aspek yang disasarkan PPB. Pernyataan-pernyataan disusun dari hasil wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, perwakilan lembaga pendidikan dan unsur-unsur masyarakat yang mewakili aspek-aspek elemen kunci Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pernyataan-pernyataan tersebut juga dibuat berdasarkan model-model pendidikan dan penelitian mengenai pembangunan untuk pembangunan berkelanjutan. Kuesioner berisi pernyataan-pernyataan yang terdiri dari

pendidikan atau pengetahuan yang diterima di sekolah dan yang diterima dari lingkungan masyarakat, antara lain seperti: manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan bermasyarakat, sikap terhadap kerusakan lingkungan, isu-isu gender,

keberlanjutan hasil tangkapan laut dan produksi pertanian, pelestarian budaya lokal, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2010; AGEPP, 2008; ESDtoolkit, 2014; Hamidi, et. al. 2012; Ngabekti, 2012; De Leo, 2012).

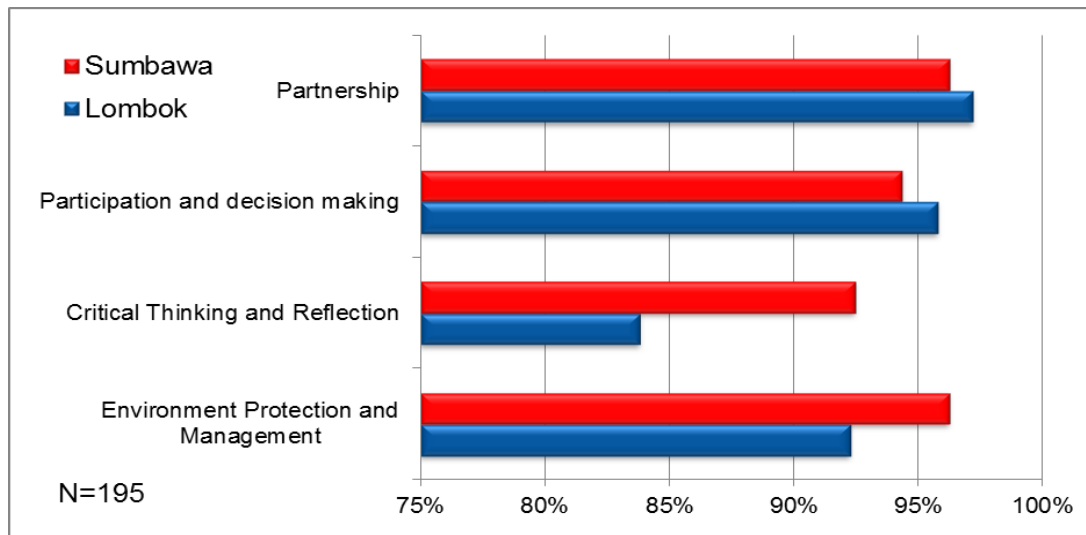


Sumber: Olah Data Primer, 2014

Gambar 6. Persepsi siswa terkait sistem pendidikan di Lombok dan Sumbawa

Lebih dari 80 persen siswa setuju pendidikan di sekolah dan lingkungan masyarakat memberikan mereka pemahaman tentang empat aspek yang diukur. Di antara empat aspek tersebut, aspek *partnership* (kemitraan) memiliki persentase tertinggi (lebih dari 95 persen). Jika dilihat antara Lombok dan Sumbawa, tidak banyak perbedaan yang ditemukan, kecuali dalam aspek *critical*

thinking and reflection (berpikir kritis dan perenungan). Dalam aspek *critical thinking and reflection*, terdapat perbedaan persepsi diantara siswa yang ada di Lombok dan Sumbawa. Siswa-siswa yang ada di Sumbawa lebih yakin pendidikan formal dan non formal dapat memberikan pemahaman untuk lebih berpikir kritis dan reflektif daripada siswa-siswa di Lombok.



Gambar 7 Persepsi siswa terhadap pemahaman aspek-aspek PPB terhadap pendidikan formal dan informal di NTB

Sumber: Olah data Primer, 2014

Pembahasan

Arah Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan IUCN, UNESCO dan organisasi internasional lainnya. Pemerintah Indonesia melalui Rencana Strategis Kementerian Pendidikan 2010-2014 membatasi cakupan PPB pada aspek budaya, tanggungjawab dan lingkungan. Pemahaman ini berakibat pada kebijakan-kebijakan di tingkat bawah yang semakin jauh dari yang diinginkan dunia internasional dengan ke empat aspeknya, yaitu: *environment protection & management*, *critical thinking & reflection*, *participation & decision making*, dan *partnership*. Akibatnya, pemahaman terhadap Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan terbatas pada kebijakan yang mengarah pada pencapaian aspek budaya, tanggungjawab dan lingkungan oleh pemerintah daerah. Begitupun pemahaman PPB di tingkat

yang lebih rendah seperti kabupaten/kota, sekolah, hingga ke masyarakat akan semakin tumpul dan memiliki persepsi yang berbeda-beda. Pemerintah sebaiknya lebih serius dalam memahami PPB dengan mengacu pada apa yang diinginkan dunia internasional dan mampu menerapkannya melalui kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran dengan mengacu pada keempat aspek di atas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sektor harus berperan lebih dalam pelaksanaan PPB di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menginisiasi Strategi Nasional Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PPB sehingga tersedia *road map* yang memberikan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan elemen masyarakat (LSM dan tokoh-tokoh masyarakat). Selain itu, pemerintah perlu melakukan kajian ke-

empat aspek-aspek PPB yang dapat dimasukkan ke dalam kurikulum ataupun kegiatan ekstrakurikuler di tingkat sekolah dan pesantren.

Menyikapi arah PPB di Indonesia yang belum sesuai dengan keinginan global, Pemerintah Provinsi NTB seharusnya melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Usaha tersebut dapat diwujudkan melalui dua cara, yaitu usaha internal dan eksternal. Secara internal, Pemerintah NTB perlu memanfaatkan sekolah, pesantren, organisasi pemuda dan LSM lokal yang telah lebih dulu melaksanakan aktivitas terkait Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Provinsi ini perlu membuat kebijakan yang menggerakkan elemen-elemen tersebut berperan serta untuk mewujudkan PPB di wilayah NTB. Pemerintah NTB perlu melibatkan pihak-pihak yang paham dengan permasalahan pendidikan dan kondisi lapangan di Nusa Tenggara Barat. Para aktivis /penggerak lingkungan dan tokoh-tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi pada program-program terkait Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah juga perlu lebih sensitif untuk melihat pendidikan informal yang ada di masyarakat seperti pengetahuan, kearifan lokal dan budaya yang dapat memberikan kontribusi pencapaian PPB. Dengan demikian, ke empat aspek PPB akan terwujud melalui kebijakan-kebijakan yang sesuai target global dan bermanfaat untuk masyarakat NTB. Selain peraturan dan kebijakan, pencapaian PPB di NTB juga perlu didukung oleh implementasi teknis seperti program

peningkatan kualitas sumberdaya manusia (terutama guru dan tokoh masyarakat), penguatan kelembagaan pendidikan, penyediaan infrastruktur penunjang PPB, termasuk dukungan penyediaan dana dan komitmen bersama pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan, masyarakat dan organisasi/LSM.

Usaha eksternal yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB antara lain dengan meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap isu-isu global yang terkait dengan isu-isu lokal di NTB. Isu-isu global tidak hanya terkait pada pendidikan, namun juga isu-isu lain yang memiliki keterkaitan seperti perubahan iklim, kemiskinan, kesehatan, ketahanan pangan kemiskinan. Pemerintah daerah perlu melihat dan belajar praktik-praktik di daerah lain yang telah menerapkan PPB seperti provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Bali (Hamidi, et al, 2014). Dalam upaya peningkatan kinerja secara eksternal, pemerintah daerah juga perlu melihat peluang kerjasama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional yang bergerak di bidang PPB. Beberapa lembaga internasional yang memiliki fokus ke arah PPB antara lain UNESCO WHO, UNICEF, dan IUCN. Pemerintah daerah NTB juga perlu melakukan komunikasi ke kementerian atau lembaga pemerintah dan non pemerintah yang memiliki program terkait PPB seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan dan DIKTI, UNICEF, dan WHO.

Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dapat terwujud melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan,

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan/LSM. Upaya pemerintah untuk melaksanakan PPB dengan kebijakan dan implementasi program perlu didukung oleh elemen-elemen terkait tersebut. Lembaga pendidikan di Nusa Tenggara Barat perlu memasukkan aspek-aspek PPB ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang memuat aspek *environment protection & management, critical thinking & reflection, participation & decision making*, dan *partnership* dapat menjadi salah satu tambahan dalam kurikulum sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, atau menjadi bagian dari kurikulum atau ekstrakurikuler yang sudah ada. Sekolah yang belum memahami dan melaksanakan aspek-aspek PPB dapat belajar dengan melakukan studi banding, atau kerjasama dengan sekolah yang telah terlebih dahulu melaksanakan pendidikan dan kegiatan terkait PPB atau sekolah pesantren. Pendidikan Pesantren memiliki keunggulan dibandingkan pendidikan sekolah pemerintah dan swasta. Hal ini dikarenakan pesantren memiliki pendidikan dengan pendekatan humanis (*insaniyah*) yang diimplementasikan dalam bentuk kepedulian lingkungan, kemandirian ekonomi, dan kepedulian sosial sesuai ajaran agama (Ngabekti, 2012). Pendidikan di NTB juga perlu memasukkan aspek-aspek PPB ke dalam pelajaran agama selain pelajaran geografi, biologi dan seni. Menurut Zamroni & Rahayu (2012), PPB dapat diimplementasikan ke dalam pelajaran agama karena mengajarkan keselarasan dan kearifan dalam kehidupan manusia.

Sekolah perlu meningkatkan pemahaman guru dan pejabatnya tentang PPB lebih luas dan berusaha mewujudkannya ke dalam pembelajaran dengan prinsip, nilai dan praktek PPB yang berwawasan global melalui tindakan-tindakan lokal. Guru perlu mengembangkan metode pembelajaran diskusi yang bersifat *bottom-up*, fokus pada kualitas dan bersifat partisipatif. Sekolah juga perlu bekerjasama dengan orang tua murid untuk berpartisipasi dan memberikan pendidikan informal yang berkaitan dengan *ESD*. Dukungan kerjasama dari LSM atau unsur masyarakat diperlukan untuk memudahkan pekerjaan guru dan pegawai sekolah di sekolah dengan ikut serta memberikan kegiatan lingkungan dan pendidikan *local wisdom* (kearifan lokal) kepada anak-anak usia sekolah. Keikutsertaan siswa dalam program Organisasi Masyarakat atau LSM dapat menjadi bagian dari penilaian pelajaran kurikulum di sekolah atau penilaian pada kegiatan ekstrakurikuler. Dukungan ini perlu disertai dengan motivasi, komitmen, monitoring, evaluasi, dan kesadaran masyarakat sekolah, sehingga pelaksanaannya dapat dipertahankan.

Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan formal, namun elemen masyarakat juga penting untuk menunjang pembentukan generasi masa depan melalui pendidikan informal. Masyarakat memiliki alat kontrol seperti peraturan adat, aturan agama, dan peraturan dalam keluarga, serta berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk menunjang pendidikan informal penunjang PPB. Masyarakat perlu lebih aktif menggiatkan anak usia sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai

dengan aspek-aspek PPB. Kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, rapat/pertemuan adat, dan kegiatan lain yang didominasi masyarakat dewasa dapat dijadikan media pengenalan dan pembelajaran pendidikan informal. Kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana untuk proses transfer kearifan lokal dan budaya tradisional yang telah hidup sejak lama. Kearifan lokal juga sudah menjadi bukti nyata negara-negara Asia dalam pelaksanaan Pembangunan untuk Pembangunan Berkelanjutan (AGEPP, 2008). Keberhasilan pendidikan informal melalui transfer kearifan lokal dan budaya tradisional antara lain terlihat dari kegiatan gotong royong yang mengajarkan proses bekerjasama dan berpartisipasi dalam lingkungan sosial, pertemuan adat yang mengajarkan berpikir kritis dan mengambil keputusan, dan sistem pertanian tradisional yang mengandalkan pupuk organik dan irigasi tradisional yang mengajarkan manajemen dan perlindungan lingkungan.

Kurangnya keinginan anak sekolah untuk mempelajari kearifan lokal dan budaya tradisional dapat diatasi melalui kegiatan-kegiatan yang nyata, menarik dan kreatif agar mengurangi keterikatan pada pola hidup modern (sosial media). Elemen masyarakat dapat bekerjasama dengan sekolah dan organisasi pemuda atau lembaga swadaya masyarakat dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan budaya tradisional ke dalam program-program terstruktur mereka yang terkait PPB. Para petua adat dan petinggi di level masyarakat perlu melibatkan anak sekolah dan generasi muda lain dalam program pemerintah yang ada di lingkungannya. Hal ini

dimaksudkan agar muncul keterlibatan generasi muda secara langsung dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi program, serta memperluas jaringan.

Organisasi pemuda dan LSM lokal di NTB memiliki peran penting dalam pendidikan informal untuk generasi muda. Program dan kegiatan mereka lebih mengarah pada aspek-aspek PPB dibandingkan lingkungan sekolah dan masyarakat. Namun, kegiatan yang dilakukan organisasi dan LSM lokal di NTB masih berjalan dengan arah masing-masing secara independen, sektoral dan minim jaringan. Kegiatan yang dilakukan mereka juga dilakukan dengan keuangan dan SDM yang terbatas, serta minim akan dukungan pemerintah. Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan juga belum menjadi isu utama program dan kegiatan organisasi dan LSM di NTB. Banyak dari program kelompok ini sebagian besar mengarahkan ke isu lingkungan daripada isu sosial seperti perubahan iklim, pelestarian biota laut, dan pencegahan *illegal logging*.

Organisasi dan LSM lokal di NTB perlu meningkatkan peran dan eksistensi mereka, antara lain dengan membangun kerjasama dan jaringan dengan LSM lokal lainnya dan LSM di tingkat nasional dan internasional; kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB; dan kerjasama dengan elemen-elemen yang ada di masyarakat. Melalui kerjasama dengan LSM lain di level yang sama dan di atas, akan didapatkan program PPB yang lebih terarah, berkualitas dengan dukungan keuangan dan SDM yang lebih profesional. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah

daerah dapat dilakukan dengan berperan dalam proses pengkajian, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kebijakan pemerintah terkait PPB. Kerjasama dengan elemen masyarakat akan memudahkan proses pelaksanaan program karena merekalah yang memahami karakter budaya dan situasi lokal di lapangan agar program PPB berhasil.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, pemahaman terhadap PPB di tingkat provinsi hingga tingkat masyarakat berbeda-beda. Di tingkat provinsi konsep PPB lebih familiar namun minim keseriusan dalam pelaksanaannya, sedangkan di tingkat kabupaten/kota PPB masih disamakan dengan pendidikan lingkungan. Pada lembaga pendidikan, guru dan pejabat cukup mengenal konsep dan aspek-aspek yang ada dalam PPB, namun terjadi perbedaan persepsi mengenai pelaksanaan PPB karena minimnya keseriusan pemerintah. Pada level masyarakat, organisasi kepemudaan dan LSM lokal lebih memahami dan melaksanakan aspek-aspek PPB daripada elemen masyarakat lainnya. *Kedua*, program yang berkaitan dengan PPB di tingkat Pemerintah adalah Program Sekolah Adiwiyata, namun hanya diikuti oleh sekolah yang memiliki predikat unggul di perkotaan. Di lembaga pendidikan, sekolah umum memasukkan aspek-aspek PPB ke dalam pelajaran Biologi, Geografi dan Seni, serta kegiatan ekstrakurikuler Pramuka, PMR dan OSIS. Lembaga pendidikan pesantren sebagian besar sudah menerapkan pengelolaan

lingkungan dengan mengaplikasikan pendidikan agama yang memperhatikan aspek kesetaraan gender, kerukunan agama, pengelolaan lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Pada level masyarakat, aspek-aspek PPB tercermin dalam *local wisdom* dan *local culture* seperti kegiatan gotong royong, pertemuan adat dan kegiatan lain yang didominasi orang dewasa, namun kegiatan tersebut kurang melibatkan generasi muda di Provinsi NTB. LSM lokal dan organisasi kepemudaan di NTB memiliki kegiatan yang lebih merepresentasikan aspek-aspek PPB, namun kegiatan yang dilakukan masih bersifat sektoral, minim sumberdaya, jaringan, keuangan dan dukungan pemerintah, serta berjalan dengan arah masing-masing. *Ketiga*, sebagian besar siswa sekolah setuju pendidikan di NTB masih memiliki sistem pendidikan yang baik. Sebagian besar siswa juga setuju pendidikan sekolah dan pendidikan lingkungan sama-sama memberikan pemahaman terhadap aspek-aspek PPB, yaitu: manajemen dan perlindungan lingkungan; berpikir kritis dan refleksi; partisipasi dan pengambilan keputusan; dan kemitraan. Pencapaian PPB di NTB dinilai masih sulit dicapai karena belum maksimalnya kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan elemen masyarakat.

Saran

Pemerintah perlu lebih serius dalam melaksanakan PPB sesuai tuntutan global. Pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang isu-isu global

yang terkait dengan isu-isu lokal di NTB. Selain itu, pemerintah perlu belajar dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang telah menerapkan PPB, seperti pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya, ataupun lembaga nasional/internasional yang memiliki program PPB, termasuk juga LSM lokal dan organisasi kepemudaan. Lembaga pendidikan, guru dan pejabat yang ada di NTB perlu menyamakan persepsi dalam pelaksanaan PPB yang dapat difasilitasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk mendukung pelaksanaan PPB di NTB, sebaiknya pemerintah di tingkat pusat memberikan dukungan kebijakan berupa roadmap Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan tingkat nasional yang memberikan koordinasi dan sinergi dari tingkat pusat hingga elemen masyarakat. Sekolah yang belum melaksanakan PPB dapat bekerjasama dengan sekolah, pesantren, LSM/organisasi kepemudaan yang sudah memasukkan aspek-aspek PPB ke dalam kegiatannya. Kerjasama dimaksud dapat berupa integrasi aspek-aspek PPB ke dalam mata pelajaran (Biologi, Geografi, Seni dan Agama) dan kegiatan ekstrakurikuler (Pramuka,

PMR dan OSIS), serta pelibatan siswa dalam program di masyarakat sebagai bagian dari pelajaran. Kerjasama ini sebaiknya disertai dengan komitmen, monitoring, dan evaluasi sehingga pelaksanaannya dapat berkesinambungan. Masyarakat di NTB perlu lebih aktif melibatkan anak usia sekolah dalam kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, pertemuan adat dan kegiatan lain yang didominasi masyarakat dewasa agar terjadi proses transfer pendidikan informal. Kegiatan tersebut perlu dikemas secara menarik dan kreatif agar meningkat partisipasinya. Masyarakat juga perlu memanfaatkan peraturan adat, agama dan peraturan keluarga sebagai alat kontrol untuk menunjang pendidikan informal dalam menunjang pelaksanaan PPB. Organisasi dan LSM lokal NTB yang mempromosikan PPB perlu meningkatkan eksistensi mereka dengan memperluas jaringan dan kerjasama dalam bentuk pengkajian, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kebijakan dengan LSM lain yang lebih profesional, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan elemen-elemen yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

AGEPP. 2008. *Buku Pedoman Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Asia*. Abe Osamu Tokyo: Japan Council on the UN Decade of Education for Sustainable Development (ESD-J).

Badan Pusat Statistik NTB. 2013. *Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2013*, <http://ntb.bps.go.id/arc/2013/statda2013/index.html#30/z>, diakses 25 Juni 2014.

Badan Pusat Statistik. 2014. *Number and Percentage of Poor People, Poverty Line, Poverty Gap Index, Poverty Severity*

- Index by Province, March 2014*,
http://www.bps.go.id/eng/tab_s ub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬a b=1, diakses 8 September 2014.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2010. *Model Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan melalui Kegiatan Intrakurikuler*,
http://litbang.kemdikbud.go.id/Data/puslitjak/laporan_hasil_penelitian/2010/ESD2010%20Model%20INTRA%20Final.pdf, diakses 14 Agustus 2014.
- Butler, J.R.A., W. Suadnya, K. Puspadi, Y. Sutaryono, R.M. Wise, T.D. Skewes, D. Kirono, E.L. Bohensky, T. Handayani, P. Habibi, M. Kisman, I. Suharto, Hanartani, S. Supartarningsih, A. Ripaldi, A. Fachry, Y. Yanuartati, G. Abbas, K. Duggam, A. Ash. 2013. *Framing The Application Of Adaptation Pathways For Rural Livelihoods And Global Change In Eastern Indonesian Islands*. Global Environmental Change, https://www.vec-ngo.org/sites/default/files/paragraph/attachments/butler_et_al_adaptation_pathways_in_eastern_indonesian_islands_gec_2014_2.pdf, diakses 28 Desember 2014
- DESD. 2012. *About Education for Sustainable Development*, <http://www.desd.org/About%20OESD.htm>, diakses tanggal 14 Agustus 2014.
- De Leo, Joy. M. 2012. *Quality Education for Sustainable Development: An educator handbook for integrating values, knowledge, skills, and quality features of education for Sustainable Development in Schooling*. Australia: UNESCO APNIEVE,
http://www.yooyahcloud.com/APNIEVE/7LHEdb/QESD_peek_inside.pdf, diakses 8 Agustus 2015.
- ESDtoolkit. 2014. *Discussion of Education for Sustainable Development: Introduction*, <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152453eo.pdf>, diakses 25 Januari 2015.
- Hamidi, A., Saleh, M., Purbaningrum, M. M., Setyaningrum, R., Kusuma, R., Adriani, R.R. Matakupan, S. J. 2014. *Perjalananan Education for Sustainable Development di Indonesia dalam perspektif LSM: Menyongsong Akhir Decade of ESD (2005-2014)*. Kelompok Kerja LSM untuk PPB di Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. *Informasi Mengenai Adiwiyata*, <http://www.menlh.go.id/informasi-mengenai-adiwiyata/>, diakses 20 Agustus 2014.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Hasil Puslitbang Kemdiknas Terkait Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan*, http://litbang.kemdikbud.go.id/Data/puslitjak/laporan_hasil_penelitian/2011/Laporan-Ringkas-Litbang-ESD-

- [Puslitjak-2008-2011pass.pdf](#), diakses 25 Juni 2014.
- Lomboknews. 2011. *Hasanain Juaini dan Ponpes Nurul Haramain Putri*, <http://lomboknews.com/2011/09/24/hasanain-juaini-dan-ponpes-nurul-haramain-putri/>, diakses tanggal 25 Juni 2014.
- Lomboktoday. 2013. *Masih Minim Penerapan Sekolah Adiwiyata di Mataram*, <http://lomboktoday.co.id/read/2013/12/06/masih-minim-penerapan-sekolah-adiwiyata-di-mataram.html>, diakses tanggal 25 Juni 2014.
- McKay, Jeanne E., Fachruddin M. Mangunjaya, Yoan Dinata, Stuart R. Harrop and Fazlun Khalid. 2013. *Practise what you preach: a faith-based approach to conservation in Indonesia*, <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?aid=9067642>, diakses 20 Januari 2016
- Mutohir, T. Ch. 2013. *Pendidikan Berkarakter Menyongsong Generasi Emas: 100 Tahun RI Merdeka*. Makalah: Disajikan pada Seminar Pendidikan di IKIP Mataram pada tanggal 30 Januari 2013.
- Muttarak, R., & Lutz, W. 2013. Is Education a Key to Reducing Vulnerability to Natural Disasters and hence Unavoidable Climate Change? *Jurnal Ecology and Society*, 19(1), 42.
- Muttarak, R., & Pothisiri, W. 2013. The role of education on disaster preparedness: case study of 2012 Indian Ocean earthquakes on Thailand's Andaman Coast. *Jurnal Ecology and Society*, 18(4), 51.
- Ngabekti, Sri. 2012. *Konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan: Kasus Pondok Pesantren Modern Selamat Kendal*. Disertasi. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup. 2015. *Kearifan Lokal adalah asset global*, <http://pplhselo.or.id/berita/kearifan-lokal-adalah-aset-global.html>, diakses 25 Januari 2016
- Sita, P. S., d 2013. *Pengaruh Kebudayaan Asing Terhadap Kebudayaan Indonesia di Kalangan Remaja*, <https://sadhvisita.files.wordpress.com/2013/12/pengaruh-kebudayaan-asing-terhadap-kebudayaan-indonesia-di-kalangan-remaja.pdf>, diakses 20 Januari 2016
- Sustainable Development. 2014. *UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development (ESD)*, <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=13&nr=466&menu=1561>, diakses 8 September 2014
- Tilbury, Daniella and Wortman, David. 2004. *Engaging people in sustainability. Commission in Education and Communication*, IUCN: Switzerland, <https://portals.iucn.org/library/files/documents/2004-055.pdf>, diakses 8 September 2014.

- UNESCO Bangkok. 2005. *Working Paper: Asia Pacific Regional Strategy for Education for Sustainable Development*. Bangkok: UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Bangkok.
- UNESCO. 2011. *Education For Sustainable Development Information Brief*, http://www.rmbr.ca/wp-content/uploads/2011/11/esd_information_brief.pdf, diakses tanggal 8 September 2014
- United Nations. 2010. *Sustainable Development: From Brutland to Rio 2012*, http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf, diakses 17 Februari 2016
- United Nations. 2014. *Introduction And Proposed Goals And Targets On Sustainable Development For The Post 2015 Development Agenda*, http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4044_zerodraft.pdf, diakses tanggal 8 September 2014
- United Nations Environment Programme. 2014. *Introduction to understanding sustainable consumption education in Indonesia*, <http://www.unep.org/resourceefficiency/Portals/24147/Consumption/ESC%20Indonesia%20%20National%20Recommendations%20&%20Guidelines%20%20Indonesian%20-%20%2002May2014.pdf>, diakses tanggal 8 September 2014.
- Utsman, Ahmad Farid. 2012. *Peran tokoh masyarakat dalam menciptakan kampung pendidikan berwawasan Islami di kawasan wisata pantai Bajul Mati Kabupaten Malang*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.
- Van der Land, V. & Hummel, D. 2013. *Vulnerability And The Role Of Education In Environmentally Induced Migration In Mali And Senegal*. *Jurnal Ecology and Society*, 18(4), 14.
- Zamroni, M. Imam dan Rahayu, Lies. 2012. *Pengembangan Madrasah Berparadigma Pembangunan Berkelanjutan*. *Kawistara*, 2(1), 48-57.